



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN  
2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan untuk meningkatkan pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan diperlukan penyesuaian Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 huruf b, angka 8, dan angka 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 80) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN  
2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN  
JASA TAHUN ANGGARAN 2024

**2. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/ Penyuluhan/ Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/ FGD/ Seminar/ Seminar Nasional dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah**

| Uraian  | Satuan  | Harga (Rp) |
|---|---------|------------|
| Panitia Penyelenggara   | oh      | 50.000     |
| Narasumber – Menteri/Pejabat Setingkat Menteri                              | oj      | 1.700.000  |
| Narasumber – Wali Kota/Wakil Wali Kota                                      | oj      | 1.400.000  |
| Narasumber – Pimpinan/Anggota DPRD  | oj      | 1.000.000  |
| Narasumber – Eselon I/Yang Disetarakan                                      | oj      | 1.200.000  |
| Narasumber – Eselon II/Yang Disetarakan                                     | oj      | 1.000.000  |
| Narasumber – Eselon III/Yang Disetarakan                                    | oj      | 900.000    |
| Narasumber – Eselon IV/JFU/Yang Disetarakan                                 | oj      | 800.000    |
| Narasumber – Akademisi S3   | oj      | 1.200.000  |
| Narasumber – Akademisi S2   | oj      | 1.000.000  |
| Narasumber – Akademisi S1   | oj      | 900.000    |
| Narasumber – Tokoh Masyarakat/Lainnya                                       | oj      | 500.000    |
| Narasumber – Kbs Online   | oj      | 150.000    |
| Moderator   | oh      | 350.000    |
| Seminar Kit   | peserta | 20.000     |
| Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Masyarakat                              | jpl     | 500.000    |
| Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Pegawai Pemerintah Daerah – Pakar/Ahli  | jpl     | 850.000    |
| Instruktur/Pengajar – Bimtek/Diklat Pegawai Pemerintah Daerah – Widyaiswara | jpl     | 200.000    |
| Instruktur JBM  | jpl     | 40.000     |

Keterangan:

oh : orang/hari

oj : orang/jam; 1 oj = 60 menit

jpl : jam pelajaran; 1 jpl = 45 menit



Ketentuan pemberian honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/FGD/Workshop/Seminar/Seminar Nasional di Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Tunjangan panitia penyelenggara:
  - Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* sub kegiatan yang sama.
  - Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
  - Panitia Penyelenggara hanya dapat diberikan untuk unsur masyarakat.
- b) Honor Instruktur/Pengajar/Narasumber/Moderator diberikan untuk selain Pegawai Pemerintah Daerah, pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pegawai pada pemerintah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
- c) Honor Instruktur/Pengajar/Narasumber/Moderator dapat diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah yang bekerja di Pemerintah Daerah dengan persyaratan penyelenggara kegiatan bukan Pemerintah Daerah dan menggunakan anggaran yang bersumber dari non APBD Pemerintah Daerah.
- d) Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber/Instruktur/Pengajar dapat diberikan dan dibuktikan dengan melampirkan materi paparan.
- e) Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- f) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- g) Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli dan Widyaiswara hanya digunakan untuk bimtek/diklat Pegawai Pemerintah Daerah.
- h) Peserta Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/ Penyuluhan/Sosialisasi/Lokakarya/FGD/Workshop/Seminar/Seminar Nasional di Pemerintah Daerah yang sudah diberikan seminar kit tidak dapat diberikan barang lain dalam bentuk apapun.
- i) Peserta pelatihan dengan praktik yang memerlukan bahan baku untuk praktik hanya dapat diberikan barang yang bersifat pakai habis dan mendukung langsung praktik pelatihan yang bersangkutan sedangkan alat yang digunakan untuk praktik diadakan melalui mekanisme sewa.

#### 4. Tunjangan Kegiatan pada Urusan Pendidikan

| NO | KEGIATAN                 | Satuan | Rp      | Rp | Rp | Rp |
|----|--------------------------|--------|---------|----|----|----|
| 1. | Pengelola UPT TK/SD, SKB |        |         |    |    |    |
|    | Bendahara Pembantu       | ob     | 250.000 |    |    |    |
|    | Pembuat Dokumen          | ob     | 200.000 |    |    |    |
| 2. | Pengelola TK             |        |         |    |    |    |
|    | Kepala Sekolah           | ob     | 200.000 |    |    |    |
|    | Bendahara Sekolah        | ob     | 175.000 |    |    |    |



| NO | KEGIATAN   | Satuan               | Rp        | Rp           | Rp            | Rp         |
|----|--|----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|    | Pengurus Barang Pembantu pada sekolah TK           | ob                   | 150.000   |              |               |            |
| 3. | Pengelola SD                                       |                      | Rombel ≤6 | Rombel ≥7    |               |            |
|    | Kepala Sekolah                                     | ob                   | 225.000   | 250.000      |               |            |
|    | Wali kelas   | ob                   | 100.000   | 100.000      |               |            |
|    | Bendahara Sekolah                                  | ob                   | 200.000   | 225.000      |               |            |
|    | Pembantu Bendahara Sekolah                         | ob                   | 175.000   | 200.000      |               |            |
|    | Ka.Perpustakaan/<br>Laboratorium                   | ob                   | 100.000   | 100.000      |               |            |
|    | Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SD           | ob                   | 150.000   | 175.000      |               |            |
| 4. | Pengelola SMP                                      |                      | Rombel ≤9 | 9<Rombel ≤12 | 13≤Rombel ≤18 | Rombel ≥19 |
|    | Kepala Sekolah                                     | ob                   | 350.000   | 375.000      | 400.000       | 425.000    |
|    | Wakil Kepala Sekolah                               | ob                   | 150.000   | 175.000      | 200.000       | 225.000    |
|    | Wali Kelas   | ob                   | 100.000   | 100.000      | 100.000       | 100.000    |
|    | Bendahara Sekolah                                  | ob                   | 300.000   | 325.000      | 350.000       | 375.000    |
|    | Pembantu Bendahara Sekolah                         | ob                   | 200.000   | 225.000      | 250.000       | 275.000    |
|    | Ka.Perpustakaan/<br>Laboratorium                   | ob                   | 125.000   | 135.000      | 140.000       | 150.000    |
|    | Pengurus Barang Pembantu pada sekolah SMP          | ob                   | 175.000   | 200.000      | 225.000       | 250.000    |
| 5. | Pengelola Kegiatan di Sekolah                      |                      | SD        | SMP          |               |            |
|    | Pembuatan Kisi-Kisi Soal Ujian Per Mata Pelajaran  | Naskah/<br>Pelajaran | 25.000    | 35.000       |               |            |
|    | Penelaah Soal Ujian Per Mata Pelajaran             | Naskah/<br>Pelajaran | 15.000    | 20.000       |               |            |
|    | Penyusunan/Pembuatan Soal Ujian Per Mata Pelajaran | Naskah/<br>Pelajaran | 30.000    | 40.000       |               |            |
|    | Koreksi Hasil Ujian Per Siswa Per Mata Pelajaran   | Naskah/<br>Pelajaran | 1000      | 1000         |               |            |
|    | Pengawas Ujian Per Mata Pelajaran                  | Naskah/<br>Pelajaran | 15.000    | 15.000       |               |            |
|    | Penguji Praktik                                    | siswa                | 4.000     | 4.000        |               |            |
|    | Pengelolaan Ijazah                                 | lembar               | 12.000    | 12.000       |               |            |



| NO  | KEGIATAN   | Satuan   | Rp         | Rp         | Rp | Rp |
|-----|--|----------|------------|------------|----|----|
|     | Pendampingan Kegiatan Siswa di Luar Sekolah (dalam DIY) per Hari (Siang atau Malam)  | per hari | 50.000     | 50.000     |    |    |
|     | Pendampingan Kegiatan Siswa di Luar Sekolah (di luar DIY) per Hari (Siang dan Malam) | per hari | 100.000    | 100.000    |    |    |
|     | Uang Saku Peserta Kegiatan Lomba/Pertandingan di Luar Sekolah (dalam DIY) per Hari   | per hari | 25.000     | 25.000     |    |    |
|     | PTT/ GTT <i>full-time</i>  | ob       | Sesuai UMK | Sesuai UMK |    |    |
|     | GTT <i>part-time</i>   | jam      | 50.000     | 50.000     |    |    |
| 5.  | Pengendali Pembelajaran/KBM  | oh       | 10.000     | 10.000     |    |    |
| 6.  | Pendalaman Materi  |          | SD         | SMP        |    |    |
|     | Tambahan Materi Pelajaran  | jpl      | 40.000     | 40.000     |    |    |
|     | Instruktur Ekstrakurikuler Per Tatap Muka  | ok       | 70.000     | 70.000     |    |    |
| 7.  | Panitia ASPD – Ujian Sekolah   |          |            |            |    |    |
|     | Penanggung Jawab Sekolah   | oh       | 75.000     |            |    |    |
|     | Pengawas Ruang Ujian   | oh       | 50.000     |            |    |    |
|     | Panitia Ujian  | oh       | 60.000     |            |    |    |
|     | Pengamanan   | oh       | 50.000     |            |    |    |
| 8.  | Pelaksanaan ASPD dan Ujian Sekolah Tingkat Sekolah                                   |          | SD/MI      | SMP/MTs    |    |    |
|     | Ketua  | ob       | 75.000     | 90.000     |    |    |
|     | Sekretaris   | ob       | 65.000     | 80.000     |    |    |
|     | Anggota  | ob       | 60.000     | 75.000     |    |    |
| 9.  | Pelaksanaan ASPD dan Ujian Sekolah Tingkat Sub Rayon                                 |          |            |            |    |    |
|     | Ketua  | ob       | 100.000    | 125.000    |    |    |
|     | Sekretaris   | ob       | 90.000     | 115.000    |    |    |
|     | Anggota  | ob       | 80.000     | 105.000    |    |    |
|     | Pengamanan   | oh       | 50.000     |            |    |    |
| 10. | Proktor, Teknisi, Helpdesk   | oh       | -          | 200.000    |    |    |



| NO  | KEGIATAN  | Satuan | Rp        | Rp | Rp | Rp |
|-----|---|--------|-----------|----|----|----|
| 11. | Pelaksanaan Ujian   |        |           |    |    |    |
|     | Pengawas ASPD Satuan Pendidikan   | oh     | 125.000   |    |    |    |
|     | Pengolah Data Peserta ASPD  | siswa  | 2.000     |    |    |    |
|     | Pengolah Nilai Peserta ASPD   | siswa  | 2.000     |    |    |    |
|     | Pengamanan Soal ASPD  | oh     | 75.000    |    |    |    |
|     | Operator Dapodik O/B  |        |           |    |    |    |
|     | Jumlah Siswa 1 – 100  | ob     | 75.000    |    |    |    |
|     | Jumlah Siswa 101 – 200  | ob     | 100.000   |    |    |    |
|     | Jumlah Siswa 201 – 300  | ob     | 125.000   |    |    |    |
|     | Jumlah siswa 301 – 400  | ob     | 150.000   |    |    |    |
|     | Jumlah siswa > 400  | ob     | 200.000   |    |    |    |
| 12. | Pengelola Kegiatan Lainnya  |        |           |    |    |    |
|     | Pengawas Ujian/Lomba/Seleksi  | oh     | 75.000    |    |    |    |
|     | Penyusun/ Penelaah Soal/ Instrumen/Materi Pembelajaran                              | oh     | 200.000   |    |    |    |
|     | Pengoreksi/Pengolah/ Analisis/Verifikasi Administrasi/Data/ Dokumen/ Soal/Instrumen | oh     | 200.000   |    |    |    |
|     | Pembuat Aransir Lagu  | oh     | 250.000   |    |    |    |
|     | Pengiring Lagu/Tari   | oh     | 200.000   |    |    |    |
|     | Guru Pendamping Khusus  | ob     | 500.000   |    |    |    |
|     | Narasumber Konsultasi Belajar Siswa (KBS) Online                                    | os     | 150.000   |    |    |    |
|     | Jasa Assesment Siswa Inklusi  | siswa  | 350.000   |    |    |    |
|     | Uji Kompetensi Pendidik PAUD  | orang  | 500.000   |    |    |    |
| 13. | Beasiswa Prestasi   |        |           |    |    |    |
|     | SD Peringkat 1 – Tingkat Kelurahan  | orang  | 1.200.000 |    |    |    |
|     | SD Peringkat 2 - Tingkat Kelurahan  | orang  | 1.000.000 |    |    |    |
|     | SMP Peringkat 1- Tingkat Kelurahan  | orang  | 1.400.000 |    |    |    |
|     | SMP Peringkat 2 - Tingkat Kelurahan   | orang  | 1.200.000 |    |    |    |





| NO  | KEGIATAN  | Satuan | Rp        | Rp | Rp | Rp |
|-----|---|--------|-----------|----|----|----|
| 14. | Insentif Pendidik PAUD  |        |           |    |    |    |
|     | Insentif Pendidik PAUD Berijazah S1 PAUD/Psikologi atau Bersertifikat Pelatihan Pendidik PAUD Tk. Mahir | tahun  | 4.500.000 |    |    |    |
|     | Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Pelatihan Pendidik PAUD Tk. Lanjut                                 | tahun  | 3.900.000 |    |    |    |
|     | Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Pelatihan Pendidik PAUD Tk. Dasar                                  | tahun  | 3.300.000 |    |    |    |
|     | Insentif Pendidik PAUD Bersertifikat Bimtek Padagogik Pendidik PAUD                                     | tahun  | 2.700.000 |    |    |    |
|     | Insentif PTTY/PTY   | ob     | 400.000   |    |    |    |
|     | Insentif TKTTY/TKTY   | ob     | 300.000   |    |    |    |
|     | Insentif Tutor  | ob     | 300.000   |    |    |    |
| 15. | Bantuan Transport Bimtek, Sosialisasi, Rapat Kerja KONI, dan Pusat Latihan Kota                         |        |           |    |    |    |
|     | Bantuan Transport tamu kehormatan Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Kerja KONI (dari luar Kota)             | oh     | 150.000   |    |    |    |
|     | Bantuan Transport Peserta Pusat Latihan Kota (Atlet)  | oh     | 70.000    |    |    |    |
|     | Bantuan Transport Peserta Pusat Latihan Kota (Pelatih)  | oh     | 95.000    |    |    |    |
|     | Bantuan Transport Peserta Pusat Latihan Kota (masyarakat)   | oh     | 40.000    |    |    |    |

Keterangan:

ob = orang/bulan

oh = orang/hari

os = orang/sessi

ok = orang/ kedatangan

jpl = jam pelajaran



- Tunjangan kegiatan pada urusan pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada fungsional guru/pengawas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu pada urusan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pengelola yang merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan, maka honorarium yang dibayarkan hanya 1 (satu).
  - b. Tunjangan Pelaksana Kegiatan pada Urusan Pendidikan dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama.
  - c. Tunjangan kegiatan di bidang pendidikan dalam tabel di atas hanya dapat diberikan untuk guru/pengawas di UPT Sekolah dan Jasa Lainnya Orang Perseorangan.
  - d. Tunjangan Pengurus Barang Pembantu hanya dapat diberikan kepada Guru/Pengawas.
- Beasiswa Prestasi diberikan untuk siswa dengan nilai ASPD tertinggi pertama dan kedua per kelurahan.
- Tamu kehormatan adalah pejabat di luar Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti pejabat setara kepala dinas, kejaksaan dan/atau anggota Forkopimda yang diundang dalam Bimtek, Sosialisasi dan/atau Rapat Kerja KONI.

## 5. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli

### 5.1. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Tenaga Ahli Fraksi DPRD

| Jabatan               | Harga (Rp) |
|-----------------------|------------|
| Tenaga Ahli Wali Kota | 5.000.000  |
| Tenaga Ahli DPRD      | 4.000.000  |
| Tenaga Ahli Fraksi    | 3.000.000  |

#### Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan.
- b. Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tenaga Ahli Wali Kota adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang membantu melaksanakan tugas-tugas Wali Kota dalam mewujudkan misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan bidang keahliannya.

### 5.2. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen

| Jabatan                               | Harga (Rp) |
|---------------------------------------|------------|
| Tenaga Ahli Forum Pemantau Independen | 4.500.000  |

#### Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan.
- b. Pengelolaan jasa tenaga ahli di atas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 5.3. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung

| Jabatan   | Harga (Rp) |
|---|------------|
| Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Pertama | 3.000.000  |
| Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Muda    | 4.000.000  |
| Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Madya   | 5.000.000  |
| Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan Gedung - Ahli Utama   | 6.000.000  |

Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan.
- b. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

### 5.4. Harga Satuan Jasa Tenaga Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

| Jabatan   | Harga (Rp) |
|---|------------|
| Tenaga Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup | 3.000.000  |

Keterangan:

- a. Satuan orang/bulan.
- b. Tenaga Ahli Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah tenaga ahli yang melakukan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## 6. Harga Satuan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

### B. Kualifikasi Berdasarkan Keahlian dan/atau Keterampilan

| Klasifikasi  | Spesifikasi | Harga (Rp) |
|--|-------------|------------|
| Aktivitas Praktik Dokter Spesialis (86202)   |             | 5.540.000  |
| Aktivitas Praktik Dokter (86201)   |             | 4.180.000  |
| Aktivitas Praktik Dokter Gigi (86203)  |             | 3.920.000  |
| Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901) | Profesi     | 3.502.000  |
| Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi (86901) | Non-Profesi | 3.250.000  |



|   |                         |           |
|---|-------------------------|-----------|
| Aktivitas Kesehatan Hewan (75000) – Dokter Hewan                |                         | 3.449.000 |
| Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)                  | S1                      | 7.000.000 |
| Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019)                  | D3                      | 5.000.000 |
| Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya (62090) |                         | 4.180.000 |
| Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (8423)                       | Pengalaman Kerja ≥14 th | 3.804.000 |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana (84234)                   | Pengalaman Kerja ≥14 th | 3.651.000 |
| Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya (43216)             | Pengalaman Kerja ≥14 th | 3.804.000 |

### 8. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan di Pemerintah Daerah

| Uraian   | Satuan         | Harga (Rp) |
|--|----------------|------------|
| Honorarium – Keamanan                                    | orang/hari     | 80.000     |
| Honorarium – Kebersihan                                  | orang/hari     | 80.000     |
| Honorarium – Petugas Pendataan                           | orang/hari     | 80.000     |
| Honorarium – Petugas Lapangan Padat Karya                | orang/bulan    | 400.000    |
| Honorarium – Petugas Paskibraka TNI/Polri                | orang/hari     | 75.000     |
| Honorarium – Pengawalan – TNI/Polri                      | orang/hari     | 100.000    |
| Honorarium – Wasit/Juri/Penilai                          | orang/hari     | 400.000    |
| Honorarium – Dewan Hakim/Pembantu Juri                   | orang/hari     | 200.000    |
| Honorarium – Petugas Persiapan Lapangan                  | orang/hari     | 150.000    |
| Honorarium – Pengawas Pertandingan                       | orang/hari     | 200.000    |
| Honorarium – Pemandu Wisata                              | orang/hari     | 250.000    |
| Honorarium - Tim Ahli Cagar Budaya                       | orang/bulan    | 3.000.000  |
| Honorarium - Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya | orang/sesi     | 500.000    |
| Honorarium - Design Katalog Seni Rupa/Pameran Museum     | orang/kegiatan | 2.500.000  |
| Honorarium - Editor Katalog Seni Rupa/Pameran Museum     | orang/kegiatan | 2.500.000  |
| Honorarium – Perupa Seni Rupa/Pameran Museum             | orang/kegiatan | 1.000.000  |
| Honorarium - Peraga Atraksi Pameran Museum               | orang/kegiatan | 600.000    |
| Honorarium - Penyiap Koleksi Pameran Museum              | orang/kegiatan | 600.000    |
| Honorarium - Fotografer Koleksi Pameran Museum           | orang/kegiatan | 3.000.000  |
| Honorarium - Illustrator Pameran Museum                  | orang/kegiatan | 2.500.000  |
| Honorarium - Editor Foto Pameran Museum                  | orang/kegiatan | 2.000.000  |
| Honorarium - Kru Display Seni Rupa /Pameran Museum       | orang/hari     | 500.000    |
| Honorarium – Pemandu Pameran                             | orang/hari     | 90.000     |
| Honorarium – Petugas Tourist Information Service         | orang/hari     | 150.000    |
| Honorarium – Petugas Korsik (Pemain Perkusi)             | orang/kegiatan | 175.000    |



| <b>Uraian</b>  | <b>Satuan</b>     | <b>Harga (Rp)</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Honorarium – Petugas Korsik (Pemain Tiup)  | orang/kegiatan    | 250.000           |
| Honorarium – Petugas Korsik (Dirigen)  | orang/kegiatan    | 250.000           |
| Honorarium – Pemeriksa Tipiring  | orang/hari        | 200.000           |
| Honorarium – Petugas Operasional – Vertikal/Mitra                                  | orang/hari        | 80.000            |
| Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Ujian/Seleksi – Vertikal/Mitra                     | orang/hari        | 100.000           |
| Honorarium - Tenaga Konselor Kinerja   | kasus             | 700.000           |
| Honorarium - Informan  | orang/kegiatan    | 500.000           |
| Honorarium - Pemberi Keterangan Saksi  | orang/kegiatan    | 1.000.000         |
| Honorarium - Pemberi Keterangan Ahli   | orang/kegiatan    | 1.800.000         |
| Honorarium - Beracara  | orang/kegiatan    | 1.800.000         |
| Honorarium – Penjaga Stand/Pameran/PMPS  | orang/hari        | 90.000            |
| Pelaku Pembuat Produk Seni dan Budaya  | orang/hari        | 300.000           |
| Volunteer/Petugas Pawai  | orang/hari        | 100.000           |
| Petugas Pemantauan Pemotongan Hewan Kurban   | orang/hari        | 150.000           |
| Dokter – Event Hari Kerja  | orang/hari        | 145.000           |
| Paramedis – Event Hari Kerja   | orang/hari        | 95.000            |
| Kru Ambulans – Event Hari Kerja  | orang/hari        | 50.000            |
| Dokter – Event Hari Libur  | orang/hari        | 180.000           |
| Kru Ambulans – Event Hari Libur  | orang/hari        | 60.000            |
| Paramedis – Event Hari Libur   | orang/hari        | 120.000           |
| Pengasuh Rumah Aman  | orang/hari        | 100.000           |
| Jasa Kinesiologi   | orang /kedatangan | 300.000           |
| Honorarium – Wartawan – Peliputan  | per liputan       | 50.000            |
| Honorarium – Wartawan – Jumpa Pers   | per liputan       | 40.000            |
| Honorarium - Petugas Pelayanan Mantap dari KUA                                     | orang/bulan       | 150.000           |
| Honorarium – Tim Kerjasama Rumah Sakit   | orang/bulan       | 250.000           |
| Biaya Transport Pemetaan Tanah   | orang/bidang      | 50.000            |
| Biaya Pembuatan Patok (Besi atau Cor Beton) Per Patok                              | pcs               | 50.000            |
| Biaya Pengiriman dan Pemasangan Patok Per Patok                                    | pcs               | 15.000            |
| Biaya Transport Petugas Ukur dan Pendamping  | bidang            | 50.000            |
| Biaya Tim Pemeriksa dan Penelitian Berkas  | bidang            | 50.000            |
| Bantuan Biaya Kertas Kerja   | orang/kegiatan    | 150.000           |
| Pelaporan Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Institusi Masyarakat Perkotaan    | orang/bulan       | 50.000            |
| Pelaporan Tim Pendamping Keluarga  | orang/bulan       | 30.000            |
| Petugas Entry/Verifikasi Data  | per lembar        | 10.000            |
| Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2 / Honor Penyampaian Surat Tagihan Tunggakan PBB-P2 | per lembar        | 3.000             |



| Uraian                       | Satuan         | Harga (Rp) |
|------------------------------|----------------|------------|
| <b>Honorarium Pelantikan</b> |                |            |
| Pengambil Sumpah             | orang/kegiatan | 1.500.000  |
| Saksi                        | orang/kegiatan | 500.000    |
| Rohaniawan                   | orang/kegiatan | 400.000    |
| Pembaca Doa                  | orang/kegiatan | 300.000    |

## 15. Ketentuan Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas dapat dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - Daerah/Instansi/Lembaga tujuan memiliki prestasi yang tidak dimiliki Kota Yogyakarta;
  - Daerah/Instansi/Lembaga tujuan memiliki keunggulan dan lebih baik dibanding Kota Yogyakarta;
  - terdapat permasalahan di Kota Yogyakarta yang pemecahannya sudah dilaksanakan dan berjalan baik pada Daerah/Instansi/Lembaga tujuan;
  - transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan perjalanan dinas;
  - ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja pemerintahan daerah;
  - efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
  - kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau personil yang ditugaskan melaporkan hasil studi banding/orientasi/kunjungan kerja kepada pemberi perintah tugas disertai dengan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan di Kota Yogyakarta; atau
  - keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja pemerintahan daerah.
- c. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Pemerintah Daerah dan/atau Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- d. Pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan pada hari kerja kecuali undangan dan pelaksanaan kegiatan.
- e. Undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d terdiri atas undangan dari:
  1. pemerintah pusat;
  2. kementerian/lembaga;
  3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
  5. pemerintah daerah lainnya.



- f. Harga satuan untuk perencanaan kebutuhan anggaran perjalanan dinas bagi Wali Kota, Tenaga Ahli Wali Kota, Tenaga Ahli DPRD, Pegawai Pemerintah Daerah, dan/atau Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang diberikan tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Dalam Jawa sebesar Rp 1.700.000 per orang/hari; dan
- 2) Luar Jawa sebesar Rp 2.500.000 per orang/hari.

Pelaksanaan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan masing-masing komponen perjalanan dinas.

### **15.1. Administrasi Perjalanan Dinas**

Administrasi perjalanan dinas diatur sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat tugas/surat perintah dan Surat Perjalanan Dinas dengan menyebutkan kode rekening pembebanan biaya.
2. Pejabat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah diatur sebagai berikut:
  - a. Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Pimpinan DPRD.
  - c. Tenaga Ahli Wali Kota yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota.
  - d. Tenaga Ahli DPRD yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Sekretaris DPRD.
  - e. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta:
    - 1) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Administrator (Eselon III) selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Wali Kota. Apabila Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Wakil Wali Kota. Apabila Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
    - 2) Pejabat Administrator (Eselon III) bukan selaku Kepala SKPD/Unit SKPD, Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana, yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan;
    - 3) Perjalanan dinas yang diikuti oleh SKPD/Unit SKPD lain, surat tugas/surat perintah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Kepala SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan, sedangkan anggarannya dapat dibebankan pada SKPD/Unit SKPD yang mempunyai mata anggaran.
  - f. Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat yang berhak menandatangani surat tugas/surat perintah adalah Kepala SKPD/Unit SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan ketugasan yang diberikan kepada yang bersangkutan.
3. Pejabat yang berhak menandatangani Surat Perjalanan Dinas adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.



4. Surat Perjalanan Dinas berlaku untuk pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan tugas dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang dituju. Dalam kondisi mendesak, perjalanan dinas dapat dilanjutkan dalam kesatuan waktu dan/atau tempat yang berbeda.
5. Sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan, maka Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat dari satuan kerja yang dituju atau institusi penyelenggara dan diwajibkan menyerahkan kembali Surat Perjalanan Dinas tersebut kepada Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing/Bendahara Pengeluaran SKPD pemberi/pemegang mata anggaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD.
6. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada Pejabat yang memberi tugas.
7. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dengan didampingi oleh Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta disertai dengan surat tugas/surat perintah Kepala SKPD/Unit SKPD.
8. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Wali Kota Yogyakarta dan Tenaga Ahli DPRD disetarakan dengan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II).
9. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Jasa Lainnya Orang Perseorangan/Masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas maksimal setara Pejabat Pengawas (Eselon IV)/PNS Golongan III atau menurut tingkat pendidikan/kepatutan yang bersangkutan.
10. Untuk perjalanan dinas dalam negeri mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) diatur sebagai berikut:
  - a. Apabila biaya diklat disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan biaya transport 1 (satu) kali PP dan uang harian diklat.
  - b. Apabila biaya diklat dan biaya transport disediakan oleh penyelenggara, maka peserta diklat hanya diberikan uang harian diklat.
  - c. Apabila biaya diklat ditanggung oleh peserta dan belum dianggarkan melalui SKPD yang membidangi pendidikan dan pelatihan, maka diberikan biaya diklat, uang harian diklat, serta biaya transport 1 (satu) kali PP.
11. Perjalanan Dinas secara rombongan dilakukan secara selektif dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala SKPD/Unit SKPD.





12. Perjalanan dinas DPRD dan pendamping diatur sebagai berikut:

| Jumlah Anggota DPRD       | Pendamping Sekretariat DPRD |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1 sampai dengan 10 orang  | 2 Orang                     |
| 11 sampai dengan 20 orang | 3 Orang                     |
| lebih dari 20 orang       | 4 Orang                     |

13. Keberangkatan perjalanan dinas mendahului surat tugas/surat perintah, dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan apabila keberangkatan pada hari libur kerja; atau
- b. izin pimpinan apabila keberangkatan pada hari kerja,

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas berangkat, dan tidak diberikan komponen uang harian, dan uang hotel di luar tanggal yang tertera di surat tugas/surat perintah.

14. Penundaan waktu kepulangan perjalanan dinas dari tanggal surat tugas/surat perintah, dengan ketentuan:

- a. keperluan pribadi dilampirkan dengan:

- 1) surat pernyataan apabila kepulangan pada hari libur kerja; atau
- 2) izin pimpinan apabila kepulangan pada hari kerja,

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang sebesar harga yang berlaku pada hari dimana seharusnya yang bersangkutan pulang, dan tidak diberikan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

- b. Acara tugas dinas diundur oleh penyelenggara/acara tugas dinas resmi yang bersambung, maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

- c. *force majeure*\*), maka kepada yang bersangkutan diberikan hak tiket angkutan perjalanan dinas pulang, mendapatkan komponen uang harian dan uang hotel selama penundaan kepulangan.

\*) *Force majeure* adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti kerusakan, bencana alam, pemogokan, dan bencana lainnya.

15. Alokasi waktu perjalanan dinas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari.
- b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa untuk keperluan konsultasi maupun studi banding/orientasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan rincian sebagai berikut:
  - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari
  - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari
  - Luar Jateng dalam Jawa : 3 (tiga) hari



- c. Alokasi waktu perjalanan dinas atas dasar undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undangan dengan tetap mempertimbangkan waktu, tempat dan sarana transportasi.
- d. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam rangka pengawalan penempatan calon transmigrasi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari.
- e. Alokasi waktu perjalanan dinas dalam kondisi darurat (*force majeure*) disesuaikan dengan kebutuhan.

## **15.2. Perjalanan Dinas Luar Daerah**

Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **15.3. Komponen Perjalanan Dinas Luar Daerah**

### **a. Biaya Transportasi**

Biaya transportasi merupakan biaya angkutan umum dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan pergi pulang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila menggunakan kendaraan sewa, biaya transportasi diberikan sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan/atau pajak dengan ketentuan:
  - 1 – 4 orang : 1 mobil.
  - 5 – 8 orang : 2 mobil.
  - 9 dan seterusnya diberikan sesuai dengan kelipatan 4.
- 2) Apabila menggunakan kendaraan sewa berupa bis (mikro maupun bis besar) biaya transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya terdiri dari kendaraan, pengemudi, BBM, biaya tol dan/atau pajak.
- 3) Apabila menggunakan kendaraan dinas, biaya transportasi diberikan dalam bentuk BBM sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan 1 (satu) liter per 10 (sepuluh) kilometer ditambah dengan biaya tol/retribusi yang dipungut pada keberangkatan dan/atau kepulangan secara at cost.
- 4) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh DPRD maka:
  - a. Apabila lokasi tujuan berada dalam 1 (satu) provinsi dan berjarak paling jauh 100 km dengan kota tujuan yang dapat ditempuh dengan pesawat maka biaya perjalanan dinas dihitung dengan menggunakan standar transportasi pesawat ditambah transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.
  - b. Apabila lokasi tujuan lebih dekat dengan kota tujuan yang dapat ditempuh dengan pesawat dan berjarak paling jauh 100 km namun berlokasi di provinsi lain, maka biaya perjalanan dinas dihitung dengan menggunakan standar transportasi pesawat ditambah uang taksi.
  - c. Dalam hal ketentuan huruf a dan huruf b tidak terpenuhi, maka menggunakan standar transportasi dengan kereta api atau transportasi dengan kendaraan umum.



- d. Dalam hal lokasi tujuan tidak terdapat dalam tabel satuan harga dan tidak memenuhi ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka biaya transportasi diperhitungkan secara *at cost*.

**Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

| Pelaksana                  | Pesawat Udara | Kapal Laut | Kereta Api/Bus    | Lainnya        |
|----------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------|
| Pimpinan DPRD              | Bisnis        | II A       | Spesial/Eksekutif | <i>lumpsum</i> |
| Anggota DPRD               | Ekonomi       | II A       | Eksekutif         |                |
| Wali Kota/ Wakil Wali Kota | Bisnis        | I B        | Spesial/Eksekutif | sesuai riil    |
| Eselon II                  | Ekonomi       | II A       | Eksekutif         |                |
| Eselon III/Golongan IV     | Ekonomi       | II A       | Eksekutif         |                |
| Eselon IV, V/Golongan III  | Ekonomi       | II A       | Eksekutif         |                |
| Golongan I/II/Lainnya      | Ekonomi       | II A       | Eksekutif         |                |
|                            |               |            |                   |                |

Keterangan:

Kereta Api Spesial : *Priority, Luxury, Compartment, Panoramic.*

Bus Spesial : *Sleeper Bus, Doubledeck.*

**Satuan Harga Transportasi dengan Pesawat Terbang (Pergi-Pulang)**

| No | Tujuan         | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD |
|----|----------------|---------------|--------------|
| 1  | Ambon          | 15.370.000    | 8.420.000    |
| 2  | Balikpapan     | 9.669.000     | 4.749.000    |
| 3  | Banda Aceh     | 9.765.000     | 5.380.000    |
| 4  | Bandar Lampung | 5.155.000     | 2.760.000    |
| 5  | Bandung        | 3.369.000     | 2.129.000    |
| 6  | Banjarmasin    | 7.723.000     | 4.022.000    |
| 7  | Batam          | 7.370.000     | 3.936.000    |
| 8  | Bengkulu       | 7.480.000     | 4.400.000    |
| 9  | Biak           | 15.048.000    | 8.108.000    |
| 10 | Denpasar       | 3.861.000     | 2.481.000    |
| 11 | Gorontalo      | 10.020.000    | 6.390.000    |
| 12 | Jakarta        | 4.107.000     | 2.268.000    |
| 13 | Jambi          | 6.653.000     | 3.551.000    |
| 14 | Jayapura       | 13.274.000    | 7.690.000    |
| 15 | Kendari        | 8.129.000     | 4.706.000    |
| 16 | Kupang         | 7.348.000     | 4.182.000    |
| 17 | Makassar       | 6.525.000     | 3.893.000    |
| 18 | Mamuju         | 10.080.000    | 6.420.000    |
| 19 | Manado         | 10.536.000    | 5.722.000    |
| 20 | Manokwari      | 17.970.000    | 11.790.000   |
| 21 | Mataram        | 4.417.000     | 2.781.000    |



| <b>No</b> | <b>Tujuan</b>  | <b>Pimpinan DPRD</b> | <b>Anggota DPRD</b> |
|-----------|----------------|----------------------|---------------------|
| 22        | Medan          | 9.519.000            | 4.770.000           |
| 23        | Padang         | 7.969.000            | 4.000.000           |
| 24        | Palangkaraya   | 7.477.000            | 4.022.000           |
| 25        | Palembang      | 6.460.000            | 3.380.000           |
| 26        | Palu           | 11.890.000           | 7.050.000           |
| 27        | Pangkal Pinang | 6.065.000            | 3.262.000           |
| 28        | Pekanbaru      | 8.022.000            | 4.054.000           |
| 29        | Pontianak      | 6.910.000            | 3.840.000           |
| 30        | Samarinda      | 9.507.200            | 3.358.000           |
| 31        | Surabaya       | 3.640.000            | 2.120.000           |
| 32        | Tarakan        | 10.006.000           | 4.930.000           |
| 33        | Ternate        | 12.470.000           | 8.010.000           |
| 34        | Timika         | 11.894.000           | 7.038.000           |



**Satuan Harga Transportasi dengan Kereta Api (Pergi-Pulang)**

| No                 | Tujuan           | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>Jawa Barat</b>  |                  |               |              |
| 1                  | Kab. Ciamis      | 920.000       | 920.000      |
| 2                  | Kab. Cirebon     | 920.000       | 920.000      |
| 3                  | Kab. Garut       | 2.750.000     | 950.000      |
| 4                  | Kab. Indramayu   | 3.050.000     | 950.000      |
| 5                  | Kab. Tasikmalaya | 920.000       | 920.000      |
| 6                  | Kota Banjar      | 940.000       | 940.000      |
| 7                  | Kota Cirebon     | 920.000       | 920.000      |
| 8                  | Kota Tasikmalaya | 920.000       | 920.000      |
| <b>Jawa Tengah</b> |                  |               |              |
| 9                  | Kab. Banyumas    | 660.000       | 660.000      |
| 10                 | Kab. Boyolali    | 270.000       | 270.000      |
| 11                 | Kab. Brebes      | 710.000       | 710.000      |
| 12                 | Kab. Cilacap     | 950.000       | 950.000      |
| 13                 | Kab. Demak       | 360.000       | 360.000      |
| 14                 | Kab. Grobogan    | 360.000       | 360.000      |
| 15                 | Kab. Karanganyar | 720.000       | 720.000      |
| 16                 | Kab. Kebumen     | 950.000       | 950.000      |
| 17                 | Kab. Kendal      | 640.000       | 640.000      |
| 18                 | Kab. Klaten      | 450.000       | 450.000      |
| 19                 | Kab. Pekalongan  | 640.000       | 640.000      |
| 20                 | Kab. Pemalang    | 540.000       | 540.000      |
| 21                 | Kab. Sragen      | 640.000       | 640.000      |
| 22                 | Kab. Tegal       | 620.000       | 620.000      |
| 23                 | Kota Pekalongan  | 460.000       | 460.000      |
| 24                 | Kota Semarang    | 640.000       | 640.000      |
| 25                 | Kota Surakarta   | 590.000       | 590.000      |
| 26                 | Kota Tegal       | 750.000       | 750.000      |
| <b>Jawa Timur</b>  |                  |               |              |
| 27                 | Kab. Banyuwangi  | 900.000       | 900.000      |
| 28                 | Kab. Blitar      | 2.880.000     | 900.000      |
| 29                 | Kab. Jember      | 3.050.000     | 950.000      |
| 30                 | Kab. Kediri      | 820.000       | 820.000      |
| 31                 | Kab. Lumajang    | 3.050.000     | 910.000      |
| 32                 | Kab. Madiun      | 2.880.000     | 910.000      |
| 33                 | Kab. Magetan     | 820.000       | 820.000      |
| 34                 | Kab. Nganjuk     | 2.880.000     | 900.000      |
| 35                 | Kab. Ngawi       | 2.880.000     | 900.000      |



| No | Tujuan           | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD |
|----|------------------|---------------|--------------|
| 36 | Kab. Tulungagung | 650.000       | 650.000      |
| 37 | Kota Blitar      | 2.880.000     | 900.000      |
| 38 | Kota Kediri      | 820.000       | 820.000      |
| 39 | Kota Madiun      | 2.880.000     | 900.000      |
| 40 | Kota Probolinggo | 780.000       | 780.000      |

**Satuan Harga Transportasi dengan Kendaraan Umum (Pergi-Pulang)**

| No                 | Tujuan            | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>Jawa Barat</b>  |                   |               |              |
| 1                  | Kab. Cianjur      | 420.000       | 420.000      |
| 2                  | Kab. Kuningan     | 700.000       | 700.000      |
| 3                  | Kab. Majalengka   | 700.000       | 700.000      |
| 4                  | Kab. Pangandaran  | 500.000       | 500.000      |
| <b>Jawa Tengah</b> |                   |               |              |
| 5                  | Kab. Banjarnegara | 550.000       | 550.000      |
| 6                  | Kab. Batang       | 500.000       | 500.000      |
| 7                  | Kab. Blora        | 500.000       | 500.000      |
| 8                  | Kab. Jepara       | 500.000       | 500.000      |
| 9                  | Kab. Kudus        | 400.000       | 400.000      |
| 10                 | Kab. Magelang     | 400.000       | 400.000      |
| 11                 | Kab. Pati         | 500.000       | 500.000      |
| 12                 | Kab. Purbalingga  | 400.000       | 400.000      |
| 13                 | Kab. Purworejo    | 400.000       | 400.000      |
| 14                 | Kab. Rembang      | 500.000       | 500.000      |
| 15                 | Kab. Semarang     | 400.000       | 400.000      |
| 16                 | Kab. Sukoharjo    | 400.000       | 400.000      |
| 17                 | Kab. Temanggung   | 400.000       | 400.000      |
| 18                 | Kab. Wonogiri     | 400.000       | 400.000      |
| 19                 | Kab. Wonosobo     | 400.000       | 400.000      |
| 20                 | Kota Magelang     | 400.000       | 400.000      |
| 21                 | Kota Salatiga     | 400.000       | 400.000      |
| <b>Jawa Timur</b>  |                   |               |              |
| 22                 | Kab. Bojonegoro   | 399.800       | 399.800      |
| 23                 | Kab. Bondowoso    | 900.000       | 900.000      |
| 24                 | Kab. Pacitan      | 400.000       | 400.000      |
| 25                 | Kab. Pamekasan    | 800.000       | 800.000      |
| 26                 | Kab. Situbondo    | 900.000       | 900.000      |
| 27                 | Kab. Sumenep      | 900.000       | 900.000      |
| 28                 | Kab. Trenggalek   | 500.000       | 500.000      |



| No | Tujuan          | Pimpinan DPRD | Anggota DPRD |
|----|-----------------|---------------|--------------|
| 29 | Kab. Tuban      | 600.000       | 600.000      |
| 30 | Kota Bojonegoro | 399.800       | 399.800      |

### b. Biaya Taksi

Biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi yang dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) keberangkatan

- dari kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan pelaksanaan acara atau hotel/penginapan.

2) kepulangan

- dari tempat tujuan pelaksanaan acara atau hotel/penginapan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
- dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal (Kota Yogyakarta).

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya taksi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembayaran biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

Khusus wali kota/wakil wali kota untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*), termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak/retribusi.

### Satuan Uang Taksi

| No. | Provinsi                | Satuan     | Besaran (Rp) |
|-----|-------------------------|------------|--------------|
| 1   | Nangroe Aceh Darussalam | orang/kali | 127.000      |
| 2   | Sumatera Utara          | orang/kali | 308.000      |
| 3   | Riau                    | orang/kali | 101.000      |
| 4   | Kepulauan Riau          | orang/kali | 165.000      |
| 5   | Jambi                   | orang/kali | 147.000      |
| 6   | Sumatera Barat          | orang/kali | 190.000      |
| 7   | Sumatera Selatan        | orang/kali | 179.000      |
| 8   | Lampung                 | orang/kali | 168.000      |
| 9   | Bengkulu                | orang/kali | 109.000      |
| 10  | Bangka Belitung         | orang/kali | 97.000       |
| 11  | Banten                  | orang/kali | 536.000      |
| 12  | Jawa Barat              | orang/kali | 200.000      |



| No. | Provinsi            | Satuan     | Besaran (Rp) |
|-----|---------------------|------------|--------------|
| 13  | D.K.I Jakarta       | orang/kali | 256.000      |
| 14  | Jawa Tengah         | orang/kali | 108.000      |
| 15  | D.I. Yogyakarta     | orang/kali | 267.000      |
| 16  | Jawa Timur          | orang/kali | 233.000      |
| 17  | Bali                | orang/kali | 227.000      |
| 18  | Nusa Tenggara Barat | orang/kali | 231.000      |
| 19  | Nusa Tenggara Timur | orang/kali | 116.000      |
| 20  | Kalimantan Barat    | orang/kali | 171.000      |
| 21  | Kalimantan Tengah   | orang/kali | 134.000      |
| 22  | Kalimantan Selatan  | orang/kali | 180.000      |
| 23  | Kalimantan Timur    | orang/kali | 533.000      |
| 24  | Kalimantan Utara    | orang/kali | 218.000      |
| 25  | Sulawesi Utara      | orang/kali | 138.000      |
| 26  | Gorontalo           | orang/kali | 265.000      |
| 27  | Sulawesi Barat      | orang/kali | 313.000      |
| 28  | Sulawesi Selatan    | orang/kali | 187.000      |
| 29  | Sulawesi Tengah     | orang/kali | 165.000      |
| 30  | Sulawesi Tenggara   | orang/kali | 171.000      |
| 31  | Maluku              | orang/kali | 288.000      |
| 32  | Maluku Utara        | orang/kali | 215.000      |
| 33  | Papua               | orang/kali | 513.000      |
| 34  | Papua Barat         | orang/kali | 236.000      |
| 35  | Papua Barat Daya    | orang/kali | 236.000      |
| 36  | Papua Tengah        | orang/kali | 513.000      |
| 37  | Papua Selatan       | orang/kali | 513.000      |
| 38  | Papua Pegunungan    | orang/kali | 513.000      |

Keterangan:

- a. Uang taksi diberikan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY.

**c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.





**Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)**

| <b>NO.</b>            | <b>IBUKOTA PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| <b>ACEH</b>           |                         |                              |               |                |
| 1                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Barat              | Orang/Kali    | 275.000        |
| 2                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Barat Daya         | Orang/Kali    | 298.000        |
| 3                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Besar              | Orang/Kali    | 183.000        |
| 4                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Jaya               | Orang/Kali    | 238.000        |
| 5                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Selatan            | Orang/Kali    | 325.000        |
| 6                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Singkil            | Orang/Kali    | 420.000        |
| 7                     | Banda Aceh              | Kab. Aceh Tamiang            | Orang/Kali    | 315.000        |
| 8                     | Banda Aceh              | Kab, Aceh Tengah             | Orang/Kali    | 293.000        |
| 9                     | Banda Aceh              | Kab, Aceh Tenggara           | Orang/Kali    | 460.000        |
| 10                    | Banda Aceh              | Kab, Aceh Timur              | Orang/Kali    | 289.000        |
| 11                    | Banda Aceh              | Kab. Aceh Utara              | Orang/Kali    | 270.000        |
| 12                    | Banda Aceh              | Kab. Bener Meriah            | Orang/Kali    | 278.000        |
| 13                    | Banda Aceh              | Kab. Bireuen                 | Orang/Kali    | 220.000        |
| 14                    | Banda Aceh              | Kab. Gayo Lues               | Orang/Kali    | 370.000        |
| 15                    | Banda Aceh              | Kab. Nagan Raya              | Orang/Kali    | 275.000        |
| 16                    | Banda Aceh              | Kab. Pidie                   | Orang/Kali    | 190.000        |
| 17                    | Banda Aceh              | Kab. Pidie Jaya              | Orang/Kali    | 205.000        |
| 18                    | Banda Aceh              | Kota Langsa                  | Orang/Kali    | 301.000        |
| 19                    | Banda Aceh              | Kota Lhokseumawe             | Orang/Kali    | 240.000        |
| 20                    | Banda Aceh              | Kota Subulussalam            | Orang/Kali    | 400.000        |
| <b>SUMATERA UTARA</b> |                         |                              |               |                |
| 21                    | Medan                   | Kab. Asahan                  | Orang/Kali    | 259.000        |
| 22                    | Medan                   | Kab. Batubara                | Orang/Kali    | 225.000        |
| 23                    | Medan                   | Kab. Dairi                   | Orang/Kali    | 270.000        |
| 24                    | Medan                   | Kab. Deli Serdang            | Orang/Kali    | 186.000        |
| 25                    | Medan                   | Kab. Humbang Hasundutan      | Orang/Kali    | 300.000        |
| 26                    | Medan                   | Kab. Karo                    | Orang/Kali    | 200.000        |
| 27                    | Medan                   | Kab. Labuhan Batu            | Orang/Kali    | 287.000        |
| 28                    | Medan                   | Kab. Labuhan Batu Selatan    | Orang/Kali    | 360.000        |
| 29                    | Medan                   | Kab. Labuhan Batu Utara      | Orang/Kali    | 300.000        |
| 30                    | Medan                   | Kab. Langkat                 | Orang/Kali    | 186.000        |
| 31                    | Medan                   | Kab. Mandailing Natal        | Orang/Kali    | 420.000        |
| 32                    | Medan                   | Kab. Padang Lawas            | Orang/Kali    | 420.000        |
| 33                    | Medan                   | Kab. Padang Lawas Utara      | Orang/Kali    | 420.000        |
| 34                    | Medan                   | Kab. Pakpak Bharat           | Orang/Kali    | 300.000        |
| 35                    | Medan                   | Kab. Samosir                 | Orang/Kali    | 330.000        |



| <b>NO.</b>            | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 36                    | Medan                       | Kab. Serdang Bedagai         | Orang/Kali    | 200.000        |
| 37                    | Medan                       | Kab. Simalungun              | Orang/Kali    | 264.000        |
| 38                    | Medan                       | Kab. Tapanuli Selatan        | Orang/Kali    | 328.000        |
| 39                    | Medan                       | Kab. Tapanuli Tengah         | Orang/Kali    | 345.000        |
| 40                    | Medan                       | Kab. Tapanuli Utara          | Orang/Kali    | 330.000        |
| 41                    | Medan                       | Kab. Toba                    | Orang/Kali    | 300.000        |
| 42                    | Medan                       | Kota Binjai                  | Orang/Kali    | 180.000        |
| 43                    | Medan                       | Kota Pematang Siantar        | Orang/Kali    | 225.000        |
| 44                    | Medan                       | Kota Sibolga                 | Orang/Kali    | 345.000        |
| 45                    | Medan                       | Kota Tanjung Balai           | Orang/Kali    | 285.000        |
| 46                    | Medan                       | Kota Tebing Tinggi           | Orang/Kali    | 203.000        |
| <b>RIAU</b>           |                             |                              |               |                |
| 47                    | Pekanbaru                   | Kab. Indragiri Hilir         | Orang/Kali    | 380.000        |
| 48                    | Pekanbaru                   | Kab. Indragiri Hulu          | Orang/Kali    | 315.000        |
| 49                    | Pekanbaru                   | Kab. Kampar                  | Orang/Kali    | 200.000        |
| 50                    | Pekanbaru                   | Kab. Kuantan Singingi        | Orang/Kali    | 300.000        |
| 51                    | Pekanbaru                   | Kab. Pelalawan               | Orang/Kali    | 225.000        |
| 52                    | Pekanbaru                   | Kab. Rokan Hilir             | Orang/Kali    | 350.000        |
| 53                    | Pekanbaru                   | Kab. Rokan Hulu              | Orang/Kali    | 322.000        |
| 54                    | Pekanbaru                   | Kab. Siak                    | Orang/Kali    | 350.000        |
| 55                    | Pekanbaru                   | Kota Dumai                   | Orang/Kali    | 400.000        |
| <b>KEPULAUAN RIAU</b> |                             |                              |               |                |
| 56                    | Tanjung Pinang              | Kab. Bintan                  | Orang/Kali    | 185.000        |
| <b>JAMBI</b>          |                             |                              |               |                |
| 57                    | Jambi                       | Kab. Batanghari              | Orang/Kali    | 175.000        |
| 58                    | Jambi                       | Kab. Bungo                   | Orang/Kali    | 270.000        |
| 59                    | Jambi                       | Kab. Kerinci                 | Orang/Kali    | 325.000        |
| 60                    | Jambi                       | Kab. Merangin                | Orang/Kali    | 260.000        |
| 61                    | Jambi                       | Kab. Muaro Jambi             | Orang/Kali    | 170.000        |
| 62                    | Jambi                       | Kab. Sarolangun              | Orang/Kali    | 241.000        |
| 63                    | Jambi                       | Kab. Tanjung Jabung Barat    | Orang/Kali    | 225.000        |
| 64                    | Jambi                       | Kab. Tanjung Jabung Timur    | Orang/Kali    | 190.000        |
| 65                    | Jambi                       | Kab. Tebo                    | Orang/Kali    | 250.000        |
| 66                    | Jambi                       | Kota Sungai Penuh            | Orang/Kali    | 308.000        |
| <b>SUMATERA BARAT</b> |                             |                              |               |                |
| 67                    | Padang                      | Kab. Agam                    | Orang/Kali    | 225.000        |
| 68                    | Padang                      | Kab. Dharmasraya             | Orang/Kali    | 250.000        |
| 69                    | Padang                      | Kab. Lima Puluh Kota         | Orang/Kali    | 225.000        |
| 70                    | Padang                      | Kab. Padang Pariaman         | Orang/Kali    | 205.000        |



| <b>NO.</b>              | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b>   | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| 71                      | Padang                      | Kab. Pasaman                   | Orang/Kali    | 250.000        |
| 72                      | Padang                      | Kab. Pasaman Barat             | Orang/Kali    | 250.000        |
| 73                      | Padang                      | Kab. Pesisir Selatan           | Orang/Kali    | 205.000        |
| 74                      | Padang                      | Kab. Sijunjung                 | Orang/Kali    | 225.000        |
| 75                      | Padang                      | Kab. Solok                     | Orang/Kali    | 210.000        |
| 76                      | Padang                      | Kab. Solok Selatan             | Orang/Kali    | 250.000        |
| 77                      | Padang                      | Kab. Tanah Datar               | Orang/Kali    | 220.000        |
| 78                      | Padang                      | Kota Bukit Tinggi              | Orang/Kali    | 215.000        |
| 79                      | Padang                      | Kota Padang Panjang            | Orang/Kali    | 210.000        |
| 80                      | Padang                      | Kota Pariaman                  | Orang/Kali    | 200.000        |
| 81                      | Padang                      | Kota Payakumbuh                | Orang/Kali    | 225.000        |
| 82                      | Padang                      | Kota Sawahlunto                | Orang/Kali    | 215.000        |
| 83                      | Padang                      | Kota Solok                     | Orang/Kali    | 210.000        |
| <b>SUMATERA SELATAN</b> |                             |                                |               |                |
| 84                      | Palembang                   | Kab. Banyuasin                 | Orang/Kali    | 203.000        |
| 85                      | Palembang                   | Kab. Empat Lawang              | Orang/Kali    | 315.000        |
| 86                      | Palembang                   | Kab. Lahat                     | Orang/Kali    | 250.000        |
| 87                      | Palembang                   | Kab. Muara Enim                | Orang/Kali    | 235.000        |
| 88                      | Palembang                   | Kab. Musi Banyuasin            | Orang/Kali    | 235.000        |
| 89                      | Palembang                   | Kab. Musi Rawas                | Orang/Kali    | 320.000        |
| 90                      | Palembang                   | Kab. Musi Rawas Utara          | Orang/Kali    | 325.000        |
| 91                      | Palembang                   | Kab. Ogan ilir                 | Orang/Kali    | 205.000        |
| 92                      | Palembang                   | Kab. Ogan Komering Ilir        | Orang/Kali    | 205.000        |
| 93                      | Palembang                   | Kab. Ogan Komering ulu         | Orang/Kali    | 248.000        |
| 94                      | Palembang                   | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Orang/Kali    | 250.000        |
| 95                      | Palembang                   | Kab. Ogan Komering Ulu Timur   | Orang/Kali    | 245.000        |
| 96                      | Palembang                   | Kab. Pali                      | Orang/Kali    | 265.000        |
| 97                      | Palembang                   | Kota Lubuk Linggau             | Orang/Kali    | 290.000        |
| 98                      | Palembang                   | Kota Pagar Alam                | Orang/Kali    | 280.000        |
| 99                      | Palembang                   | Kota Prabumulih                | Orang/Kali    | 205.000        |
| <b>LAMPUNG</b>          |                             |                                |               |                |
| 100                     | Bandar Lampung              | Kab. Lampung Barat             | Orang/Kali    | 270.000        |
| 101                     | Bandar Lampung              | Kab. Lampung Selatan           | Orang/Kali    | 234.000        |
| 102                     | Bandar Lampung              | Kab. Lampung Tengah            | Orang/Kali    | 246.000        |
| 103                     | Bandar Lampung              | Kab. Lampung Timur             | Orang/Kali    | 246.000        |
| 104                     | Bandar Lampung              | Kab. Lampung Utara             | Orang/Kali    | 252.000        |
| 105                     | Bandar Lampung              | Kab. Mesuji                    | Orang/Kali    | 276.000        |



| <b>NO.</b>             | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 106                    | Bandar Lampung              | Kab. Pesawaran               | Orang/Kali    | 216.000        |
| 107                    | Bandar Lampung              | Kab. Pesisir Barat           | Orang/Kali    | 200.000        |
| 108                    | Bandar Lampung              | Kab. Pringsewu               | Orang/Kali    | 222.000        |
| 109                    | Bandar Lampung              | Kab. Tanggamus               | Orang/Kali    | 240.000        |
| 110                    | Bandar Lampung              | Kab. Tulang Bawang           | Orang/Kali    | 252.000        |
| 111                    | Bandar Lampung              | Kab. Tulang Bawang Barat     | Orang/Kali    | 267.000        |
| 112                    | Bandar Lampung              | Kab. Way Kanan               | Orang/Kali    | 270.000        |
| 113                    | Bandar Lampung              | Kota Metro                   | Orang/Kali    | 234.000        |
| <b>BENGKULU</b>        |                             |                              |               |                |
| 114                    | Bengkulu                    | Kab. Bengkulu Selatan        | Orang/Kali    | 344.000        |
| 115                    | Bengkulu                    | Kab. Bengkulu Tengah         | Orang/Kali    | 232.000        |
| 116                    | Bengkulu                    | Kab. Bengkulu Utara          | Orang/Kali    | 313.000        |
| 117                    | Bengkulu                    | Kab. Kaur                    | Orang/Kali    | 385.000        |
| 118                    | Bengkulu                    | Kab. Kepahiang               | Orang/Kali    | 298.000        |
| 119                    | Bengkulu                    | Kab. Lebong                  | Orang/Kali    | 375.000        |
| 120                    | Bengkulu                    | Kab. Mukomuko                | Orang/Kali    | 423.000        |
| 121                    | Bengkulu                    | Kab. Rejang Lebong           | Orang/Kali    | 313.000        |
| 122                    | Bengkulu                    | Kab. Seluma                  | Orang/Kali    | 282.000        |
| <b>BANGKA BELITUNG</b> |                             |                              |               |                |
| 123                    | Pangkalpinang               | Kab. Bangka                  | Orang/Kali    | 250.000        |
| 124                    | Pangkalpinang               | Kab. Bangka Barat            | Orang/Kali    | 275.000        |
| 125                    | Pangkalpinang               | Kab. Bangka Selatan          | Orang/Kali    | 275.000        |
| 126                    | Pangkalpinang               | Kab. Bangka Tengah           | Orang/Kali    | 250.000        |
| <b>BANTEN</b>          |                             |                              |               |                |
| 127                    | Serang                      | Kab. Lebak                   | Orang/Kali    | 208.000        |
| 128                    | Serang                      | Kab. Pandeglang              | Orang/Kali    | 138.000        |
| 129                    | Serang                      | Kab. Serang                  | Orang/Kali    | 160.000        |
| 130                    | Serang                      | Kab. Tangerang               | Orang/Kali    | 254.000        |
| 131                    | Serang                      | Kota Cilegon                 | Orang/Kali    | 100.000        |
| 132                    | Serang                      | Kota Tangerang               | Orang/Kali    | 313.000        |
| 133                    | Serang                      | Kota Tangerang Selatan       | Orang/Kali    | 347.000        |
| <b>JAWA BARAT</b>      |                             |                              |               |                |
| 134                    | Bandung                     | Kab. Bandung                 | Orang/Kali    | 183.000        |
| 135                    | Bandung                     | Kab. Bandung Barat           | Orang/Kali    | 275.000        |
| 136                    | Bandung                     | Kab. Bekasi                  | Orang/Kali    | 265.000        |
| 137                    | Bandung                     | Kab. Bogor                   | Orang/Kali    | 185.000        |
| 138                    | Bandung                     | Kab. Ciamis                  | Orang/Kali    | 245.000        |
| 139                    | Bandung                     | Kab. Cianjur                 | Orang/Kali    | 215.000        |
| 140                    | Bandung                     | Kab. Cirebon                 | Orang/Kali    | 280.000        |



| <b>NO.</b>         | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 141                | Bandung                     | Kab. Garut                   | Orang/Kali    | 243.000        |
| 142                | Bandung                     | Kab. Indramayu               | Orang/Kali    | 275.000        |
| 143                | Bandung                     | Kab. Karawang                | Orang/Kali    | 248.000        |
| 144                | Bandung                     | Kab. Kuningan                | Orang/Kali    | 275.000        |
| 145                | Bandung                     | Kab. Majalengka              | Orang/Kali    | 235.000        |
| 146                | Bandung                     | Kab. Pangandaran             | Orang/Kali    | 283.000        |
| 147                | Bandung                     | Kab. Purwakarta              | Orang/Kali    | 218.000        |
| 148                | Bandung                     | Kab. Subang                  | Orang/Kali    | 208.000        |
| 149                | Bandung                     | Kab. Sukabumi                | Orang/Kali    | 245.000        |
| 150                | Bandung                     | Kab. Sumedang                | Orang/Kali    | 230.000        |
| 151                | Bandung                     | Kab. Tasikmalaya             | Orang/Kali    | 245.000        |
| 152                | Bandung                     | Kota Banjar                  | Orang/Kali    | 283.000        |
| 153                | Bandung                     | Kota Bekasi                  | Orang/Kali    | 205.000        |
| 154                | Bandung                     | Kota Bogor                   | Orang/Kali    | 285.000        |
| 155                | Bandung                     | Kota Cimahi                  | Orang/Kali    | 168.000        |
| 156                | Bandung                     | Kota Cirebon                 | Orang/Kali    | 270.000        |
| 157                | Bandung                     | Kota Depok                   | Orang/Kali    | 275.000        |
| 158                | Bandung                     | Kota Sukabumi                | Orang/Kali    | 226.000        |
| 159                | Bandung                     | Kota Tasikmalaya             | Orang/Kali    | 245.000        |
| <b>JAWA TENGAH</b> |                             |                              |               |                |
| 160                | Semarang                    | Kab. Banjarnegara            | Orang/Kali    | 260.000        |
| 161                | Semarang                    | Kab. Banyumas                | Orang/Kali    | 257.000        |
| 162                | Semarang                    | Kab. Batang                  | Orang/Kali    | 240.000        |
| 163                | Semarang                    | Kab. Blora                   | Orang/Kali    | 270.000        |
| 164                | Semarang                    | Kab. Boyolali                | Orang/Kali    | 240.000        |
| 165                | Semarang                    | Kab. Brebes                  | Orang/Kali    | 263.000        |
| 166                | Semarang                    | Kab. Cilacap                 | Orang/Kali    | 280.000        |
| 167                | Semarang                    | Kab. Demak                   | Orang/Kali    | 230.000        |
| 168                | Semarang                    | Kab. Grobogan                | Orang/Kali    | 235.000        |
| 169                | Semarang                    | Kab. Jepara                  | Orang/Kali    | 240.000        |
| 170                | Semarang                    | Kab. Karanganyar             | Orang/Kali    | 250.000        |
| 171                | Semarang                    | Kab. Kebumen                 | Orang/Kali    | 260.000        |
| 172                | Semarang                    | Kab. Kendal                  | Orang/Kali    | 230.000        |
| 173                | Semarang                    | Kab. Klaten                  | Orang/Kali    | 250.000        |
| 174                | Semarang                    | Kab. Kudus                   | Orang/Kali    | 235.000        |
| 175                | Semarang                    | Kab. Magelang                | Orang/Kali    | 240.000        |
| 176                | Semarang                    | Kab. Pati                    | Orang/Kali    | 240.000        |
| 177                | Semarang                    | Kab. Pekalongan              | Orang/Kali    | 245.000        |
| 178                | Semarang                    | Kab. Pemasang                | Orang/Kali    | 250.000        |



| <b>NO.</b>             | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 179                    | Semarang                    | Kab. Purbalingga             | Orang/Kali    | 270.000        |
| 180                    | Semarang                    | Kab. Purworejo               | Orang/Kali    | 250.000        |
| 181                    | Semarang                    | Kab. Rembang                 | Orang/Kali    | 250.000        |
| 182                    | Semarang                    | Kab. Semarang                | Orang/Kali    | 230.000        |
| 183                    | Semarang                    | Kab. Sragen                  | Orang/Kali    | 250.000        |
| 184                    | Semarang                    | Kab. Sukoharjo               | Orang/Kali    | 250.000        |
| 185                    | Semarang                    | Kab. Tegal                   | Orang/Kali    | 260.000        |
| 186                    | Semarang                    | Kab. Temanggung              | Orang/Kali    | 240.000        |
| 187                    | Semarang                    | Kab. Wonogiri                | Orang/Kali    | 250.000        |
| 188                    | Semarang                    | Kab. Wonosobo                | Orang/Kali    | 250.000        |
| 189                    | Semarang                    | Kota Magelang                | Orang/Kali    | 240.000        |
| 190                    | Semarang                    | Kota Pekalongan              | Orang/Kali    | 245.000        |
| 191                    | Semarang                    | Kota Salatiga                | Orang/Kali    | 235.000        |
| 192                    | Semarang                    | Kota Surakarta               | Orang/Kali    | 245.000        |
| 193                    | Semarang                    | Kota Tegal                   | Orang/Kali    | 260.000        |
| <b>D.I. YOGYAKARTA</b> |                             |                              |               |                |
| 194                    | Yogyakarta                  | Kab. Bantul                  | Orang/Kali    | 250.000        |
| 195                    | Yogyakarta                  | Kab. Gunung Kidul            | Orang/Kali    | 350.000        |
| 196                    | Yogyakarta                  | Kab. Kulon Progo             | Orang/Kali    | 350.000        |
| 197                    | Yogyakarta                  | Kab. Sleman                  | Orang/Kali    | 200.000        |
| <b>JAWA TIMUR</b>      |                             |                              |               |                |
| 198                    | Surabaya                    | Kab. Bangkalan               | Orang/Kali    | 225.000        |
| 199                    | Surabaya                    | Kab. Banyuwangi              | Orang/Kali    | 285.000        |
| 200                    | Surabaya                    | Kab. Blitar                  | Orang/Kali    | 255.000        |
| 201                    | Surabaya                    | Kab. Bojonegoro              | Orang/Kali    | 225.000        |
| 202                    | Surabaya                    | Kab. Bondowoso               | Orang/Kali    | 255.000        |
| 203                    | Surabaya                    | Kab. Gresik                  | Orang/Kali    | 225.000        |
| 204                    | Surabaya                    | Kab. Jember                  | Orang/Kali    | 261.000        |
| 205                    | Surabaya                    | Kab. Jombang                 | Orang/Kali    | 235.000        |
| 206                    | Surabaya                    | Kab. Kediri                  | Orang/Kali    | 235.000        |
| 207                    | Surabaya                    | Kab. Lamongan                | Orang/Kali    | 225.000        |
| 208                    | Surabaya                    | Kab. Lumajang                | Orang/Kali    | 261.000        |
| 209                    | Surabaya                    | Kab. Madiun                  | Orang/Kali    | 245.000        |
| 210                    | Surabaya                    | Kab. Magetan                 | Orang/Kali    | 253.000        |
| 211                    | Surabaya                    | Kab. Malang                  | Orang/Kali    | 228.000        |
| 212                    | Surabaya                    | Kab. Mojokerto               | Orang/Kali    | 225.000        |
| 213                    | Surabaya                    | Kab. Nganjuk                 | Orang/Kali    | 245.000        |
| 214                    | Surabaya                    | Kab. Ngawi                   | Orang/Kali    | 253.000        |
| 215                    | Surabaya                    | Kab. Pacitan                 | Orang/Kali    | 285.000        |



| <b>NO.</b>                 | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 216                        | Surabaya                    | Kab. Pamekasan               | Orang/Kali    | 243.000        |
| 217                        | Surabaya                    | Kab. Pasuruan                | Orang/Kali    | 228.000        |
| 218                        | Surabaya                    | Kab. Ponorogo                | Orang/Kali    | 255.000        |
| 219                        | Surabaya                    | Kab. Probolinggo             | Orang/Kali    | 228.000        |
| 220                        | Surabaya                    | Kab. Sampang                 | Orang/Kali    | 235.000        |
| 221                        | Surabaya                    | Kab. Sidoarjo                | Orang/Kali    | 240.000        |
| 222                        | Surabaya                    | Kab. Situbondo               | Orang/Kali    | 255.000        |
| 223                        | Surabaya                    | Kab. Sumenep                 | Orang/Kali    | 255.000        |
| 224                        | Surabaya                    | Kab. Trenggalek              | Orang/Kali    | 245.000        |
| 225                        | Surabaya                    | Kab. Tuban                   | Orang/Kali    | 245.000        |
| 226                        | Surabaya                    | Kab. Tulungagung             | Orang/Kali    | 245.000        |
| 227                        | Surabaya                    | Kota Batu                    | Orang/Kali    | 242.000        |
| 228                        | Surabaya                    | Kota Blitar                  | Orang/Kali    | 255.000        |
| 229                        | Surabaya                    | Kota Bojonegoro              | Orang/Kali    | 225.000        |
| 230                        | Surabaya                    | Kota Kediri                  | Orang/Kali    | 235.000        |
| 231                        | Surabaya                    | Kota Madiun                  | Orang/Kali    | 245.000        |
| 232                        | Surabaya                    | Kota Malang                  | Orang/Kali    | 228.000        |
| 233                        | Surabaya                    | Kota Mojokerto               | Orang/Kali    | 225.000        |
| 234                        | Surabaya                    | Kota Probolinggo             | Orang/Kali    | 228.000        |
| <b>BALI</b>                |                             |                              |               |                |
| 235                        | Denpasar                    | Kab. Badung                  | Orang/Kali    | 188.000        |
| 236                        | Denpasar                    | Kab. Bangli                  | Orang/Kali    | 225.000        |
| 237                        | Denpasar                    | Kab. Buleleng                | Orang/Kali    | 265.000        |
| 238                        | Denpasar                    | Kab. Gianyar                 | Orang/Kali    | 225.000        |
| 239                        | Denpasar                    | Kab. Jembrana                | Orang/Kali    | 270.000        |
| 240                        | Denpasar                    | Kab. Karangasem              | Orang/Kali    | 263.000        |
| 241                        | Denpasar                    | Kab. Tabanan                 | Orang/Kali    | 225.000        |
| <b>NUSA TENGGARA BARAT</b> |                             |                              |               |                |
| 242                        | Mataram                     | Kab. Lombok Barat            | Orang/Kali    | 325.000        |
| 243                        | Mataram                     | Kab. Lombok Tengah           | Orang/Kali    | 450.000        |
| 244                        | Mataram                     | Kab. Lombok Timur            | Orang/Kali    | 350.000        |
| <b>NUSA TENGGARA TIMUR</b> |                             |                              |               |                |
| 245                        | Kupang                      | Kab. Belu                    | Orang/Kali    | 325.000        |
| 246                        | Kupang                      | Kab. Kupang                  | Orang/Kali    | 175.000        |
| 247                        | Kupang                      | Kab. Timor Tengah Selatan    | Orang/Kali    | 218.000        |
| 248                        | Kupang                      | Kab. Timor Tengah Utara      | Orang/Kali    | 275.000        |
| <b>KALIMANTAN BARAT</b>    |                             |                              |               |                |
| 249                        | Pontianak                   | Kab. Bengkayang              | Orang/Kali    | 270.000        |
| 250                        | Pontianak                   | Kab. Kapuas Hulu             | Orang/Kali    | 550.000        |



| <b>NO.</b>                | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 251                       | Pontianak                   | Kab. Kayong Utara            | Orang/Kali    | 550.000        |
| 252                       | Pontianak                   | Kab. Ketapang                | Orang/Kali    | 550.000        |
| 253                       | Pontianak                   | Kab. Kubu Raya               | Orang/Kali    | 185.000        |
| 254                       | Pontianak                   | Kab. Landak                  | Orang/Kali    | 270.000        |
| 255                       | Pontianak                   | Kab. Melawi                  | Orang/Kali    | 430.000        |
| 256                       | Pontianak                   | Kab. Mempawah                | Orang/Kali    | 230.000        |
| 257                       | Pontianak                   | Kab. Sambas                  | Orang/Kali    | 300.000        |
| 258                       | Pontianak                   | Kab. Sanggau                 | Orang/Kali    | 303.000        |
| 259                       | Pontianak                   | Kab. Sekadau                 | Orang/Kali    | 343.000        |
| 260                       | Pontianak                   | Kab. Sintang                 | Orang/Kali    | 392.000        |
| 261                       | Pontianak                   | Kota Singkawang              | Orang/Kali    | 257.000        |
| <b>KALIMANTAN TENGAH</b>  |                             |                              |               |                |
| 262                       | Palangkaraya                | Kab. Barito Selatan          | Orang/Kali    | 290.000        |
| 263                       | Palangkaraya                | Kab. Barito Timur            | Orang/Kali    | 333.000        |
| 264                       | Palangkaraya                | Kab. Barito Utara            | Orang/Kali    | 425.000        |
| 265                       | Palangkaraya                | Kab. Gunung Mas              | Orang/Kali    | 300.000        |
| 266                       | Palangkaraya                | Kab. Kapuas                  | Orang/Kali    | 275.000        |
| 267                       | Palangkaraya                | Kab. Katingan                | Orang/Kali    | 250.000        |
| 268                       | Palangkaraya                | Kab. Kotawaringin Barat      | Orang/Kali    | 425.000        |
| 269                       | Palangkaraya                | Kab. Kotawaringin Timur      | Orang/Kali    | 300.000        |
| 270                       | Palangkaraya                | Kab. Lamandau                | Orang/Kali    | 525.000        |
| 271                       | Palangkaraya                | Kab. Murung Raya             | Orang/Kali    | 448.000        |
| 272                       | Palangkaraya                | Kab. Pulau Pisau             | Orang/Kali    | 250.000        |
| 273                       | Palangkaraya                | Kab. Seruyan                 | Orang/Kali    | 328.000        |
| 274                       | Palangkaraya                | Kab. Sukamara                | Orang/Kali    | 525.000        |
| <b>KALIMANTAN SELATAN</b> |                             |                              |               |                |
| 275                       | Banjarmasin                 | Kab. Balangan                | Orang/Kali    | 230.000        |
| 276                       | Banjarmasin                 | Kab. Banjar                  | Orang/Kali    | 170.000        |
| 277                       | Banjarmasin                 | Kab. Barito Kuala            | Orang/Kali    | 200.000        |
| 278                       | Banjarmasin                 | Kab. Hulu Sungai Selatan     | Orang/Kali    | 200.000        |
| 279                       | Banjarmasin                 | Kab. Hulu Sungai Tengah      | Orang/Kali    | 212.000        |
| 280                       | Banjarmasin                 | Kab. Hulu Sungai Utara       | Orang/Kali    | 218.000        |
| 281                       | Banjarmasin                 | Kab. Kota Baru               | Orang/Kali    | 290.000        |
| 282                       | Banjarmasin                 | Kab. Tabalong                | Orang/Kali    | 234.000        |
| 283                       | Banjarmasin                 | Kab. Tanah Bumbu             | Orang/Kali    | 300.000        |
| 284                       | Banjarmasin                 | Kab. Tanah Laut              | Orang/Kali    | 200.000        |
| 285                       | Banjarmasin                 | Kab. Tapin                   | Orang/Kali    | 189.000        |
| 286                       | Banjarmasin                 | Kota Banjarbaru              | Orang/Kali    | 225.000        |





| NO.                     | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN          | SATUAN     | BESARAN   |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| <b>KALIMANTAN TIMUR</b> |                     |                                |            |           |
| 287                     | Samarinda           | Kab. Kutai Barat               | Orang/Kali | 1.500.000 |
| 288                     | Samarinda           | Kab. Kutai Kartanegara         | Orang/Kali | 500.000   |
| 289                     | Samarinda           | Kab. Kutai Timur               | Orang/Kali | 1.350.000 |
| 290                     | Samarinda           | Kab. Paser                     | Orang/Kali | 1.650.000 |
| 291                     | Samarinda           | Kab. Penajam Paser Utara       | Orang/Kali | 650.000   |
| 292                     | Samarinda           | Kota Balikpapan                | Orang/Kali | 550.000   |
| 292                     | Samarinda           | Kota Bontang                   | Orang/Kali | 600.000   |
| <b>SULAWESI UTARA</b>   |                     |                                |            |           |
| 294                     | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow         | Orang/Kali | 250.000   |
| 295                     | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Orang/Kali | 275.000   |
| 296                     | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow Timur   | Orang/Kali | 250.000   |
| 297                     | Manado              | Kab. Bolaang Mongondow Utara   | Orang/Kali | 300.000   |
| 298                     | Manado              | Kab. Minahasa                  | Orang/Kali | 180.000   |
| 299                     | Manado              | Kab. Minahasa Selatan          | Orang/Kali | 180.000   |
| 300                     | Manado              | Kab. Minahasa Tenggara         | Orang/Kali | 200.000   |
| 301                     | Manado              | Kab. Minahasa Utara            | Orang/Kali | 175.000   |
| 302                     | Manado              | Kota Bitung                    | Orang/Kali | 175.000   |
| 303                     | Manado              | Kota Kotamobagu                | Orang/Kali | 250.000   |
| 304                     | Manado              | Kota Tomohon                   | Orang/Kali | 170.000   |
| <b>GORONTALO</b>        |                     |                                |            |           |
| 305                     | Gorontalo           | Kab. Boalemo                   | Orang/Kali | 400.000   |
| 306                     | Gorontalo           | Kab. Gorontalo                 | Orang/Kali | 300.000   |
| 307                     | Gorontalo           | Kab. Gorontalo Utara           | Orang/Kali | 350.000   |
| 308                     | Gorontalo           | Kab. Pahuwato                  | Orang/Kali | 650.000   |
| <b>SULAWESI BARAT</b>   |                     |                                |            |           |
| 309                     | Mamuju              | Kab. Majene                    | Orang/Kali | 240.000   |
| 310                     | Mamuju              | Kab. Mamasa                    | Orang/Kali | 359.000   |
| 311                     | Mamuju              | Kab. Mamuju Tengah             | Orang/Kali | 200.000   |
| 312                     | Mamuju              | Kab. Pasangkayu                | Orang/Kali | 270.000   |
| 313                     | Mamuju              | Kab. Polewali Mandar           | Orang/Kali | 260.000   |
| <b>SULAWESI SELATAN</b> |                     |                                |            |           |
| 314                     | Makassar            | Kab. Bantaeng                  | Orang/Kali | 235.000   |
| 315                     | Makassar            | Kab. Barru                     | Orang/Kali | 210.000   |
| 316                     | Makassar            | Kab. Bone                      | Orang/Kali | 240.000   |
| 317                     | Makassar            | Kab. Bulukumba                 | Orang/Kali | 240.000   |
| 318                     | Makassar            | Kab. Enrekang                  | Orang/Kali | 250.000   |



| <b>NO.</b>               | <b>IBUKOTA<br/>PROVINSI</b> | <b>KABUPATEN/KOTA TUJUAN</b> | <b>SATUAN</b> | <b>BESARAN</b> |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 319                      | Makassar                    | Kab. Gowa                    | Orang/Kali    | 175.000        |
| 320                      | Makassar                    | Kab. Jeneponto               | Orang/Kali    | 230.000        |
| 321                      | Makassar                    | Kab. Luwu                    | Orang/Kali    | 350.000        |
| 322                      | Makassar                    | Kab. Luwu Timur              | Orang/Kali    | 375.000        |
| 323                      | Makassar                    | Kab. Luwu Utara              | Orang/Kali    | 365.000        |
| 324                      | Makassar                    | Kab. Maros                   | Orang/Kali    | 170.000        |
| 325                      | Makassar                    | Kab. Pinrang                 | Orang/Kali    | 230.000        |
| 320                      | Makassar                    | Kab. Sidenreng Rappang       | Orang/Kali    | 230.000        |
| 327                      | Makassar                    | Kab. Sinjai                  | Orang/Kali    | 235.000        |
| 328                      | Makassar                    | Kab. Soppeng                 | Orang/Kali    | 235.000        |
| 329                      | Makassar                    | Kab. Takalar                 | Orang/Kali    | 190.000        |
| 330                      | Makassar                    | Kab. Tanatoraja              | Orang/Kali    | 350.000        |
| 331                      | Makassar                    | Kab. Toraja Utara            | Orang/Kali    | 350.000        |
| 332                      | Makassar                    | Kab. Wajo                    | Orang/Kali    | 230.000        |
| 333                      | Makassar                    | Kota Palopo                  | Orang/Kali    | 350.000        |
| 334                      | Makassar                    | Kota Pare-Pare               | Orang/Kali    | 225.000        |
| <b>SULAWESI TENGAH</b>   |                             |                              |               |                |
| 335                      | Palu                        | Kab. Luwuk (Banggai)         | Orang/Kali    | 400.000        |
| 336                      | Palu                        | Kab. Buol                    | Orang/Kali    | 472.000        |
| 337                      | Palu                        | Kab. Donggala                | Orang/Kali    | 130.000        |
| 338                      | Palu                        | Kab. Morowali                | Orang/Kali    | 400.000        |
| 339                      | Palu                        | Kab. Morowali Utara          | Orang/Kali    | 400.000        |
| 340                      | Palu                        | Kab. Parigi Moutong          | Orang/Kali    | 250.000        |
| 341                      | Palu                        | Kab. Poso                    | Orang/Kali    | 280.000        |
| 342                      | Palu                        | Kab. Sigi                    | Orang/Kali    | 219.000        |
| 343                      | Palu                        | Kab. Tojouna-Una             | Orang/Kali    | 350.000        |
| 344                      | Palu                        | Kab. Toli-Toli               | Orang/Kali    | 412.000        |
| <b>SULAWESI TENGGARA</b> |                             |                              |               |                |
| 345                      | Kendari                     | Kab. Bombana                 | Orang/Kali    | 355.000        |
| 346                      | Kendari                     | Kab. Kolaka                  | Orang/Kali    | 370.000        |
| 347                      | Kendari                     | Kab. Kolaka Timur            | Orang/Kali    | 300.000        |
| 348                      | Kendari                     | Kab. Kolaka Utara            | Orang/Kali    | 425.000        |
| 349                      | Kendari                     | Kab. Konawe                  | Orang/Kali    | 300.000        |
| 350                      | Kendari                     | Kab. Konawe Selatan          | Orang/Kali    | 305.000        |
| 351                      | Kendari                     | Kab. Konawe Utara            | Orang/Kali    | 300.000        |
| <b>MALUKU UTARA</b>      |                             |                              |               |                |
| 352                      | Sofifi                      | Kab. Halmahera Barat         | Orang/Kali    | 850.000        |
| 353                      | Sofifi                      | Kab. Halmahera Tengah        | Orang/Kali    | 1.000.000      |
| 354                      | Sofifi                      | Kab. Halmahera Timur         | Orang/Kali    | 1.250.000      |



| NO.                | IBUKOTA<br>PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN  | SATUAN     | BESARAN   |
|--------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------|
| 355                | Sofifi              | Kab. Halmahera Utara   | Orang/Kali | 900.000   |
| <b>PAPUA</b>       |                     |                        |            |           |
| 356                | Jayapura            | Kab. Jayapura          | Orang/Kali | 600.000   |
| 357                | Jayapura            | Kab. Keerom            | Orang/Kali | 900.000   |
| 358                | Jayapura            | Kab. Sarmi             | Orang/Kali | 2.700.000 |
| <b>PAPUA BARAT</b> |                     |                        |            |           |
| 359                | Manokwari           | Kab. Teluk Bintuni     | Orang/Kali | 900.000   |
| 360                | Manokwari           | Kab. Manokwari Selatan | Orang/Kali | 750.000   |
| 361                | Manokwari           | Kab. Pegunungan Arfak  | Orang/Kali | 2.650.000 |

#### d. Uang Harian

Uang harian yang diberikan secara *lumpsum* merupakan biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas yang meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan.

#### Satuan Uang Harian

| No | Provinsi                | Satuan | Non Diklat (Rp) | Diklat (Rp) |
|----|-------------------------|--------|-----------------|-------------|
| 1  | Nangroe Aceh Darussalam | oh     | 360.000         | 110.000     |
| 2  | Sumatera Utara          | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 3  | Riau                    | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 4  | Kepulauan Riau          | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 5  | Jambi                   | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 6  | Sumatera Barat          | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 7  | Sumatera Selatan        | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 8  | Lampung                 | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 9  | Bengkulu                | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 10 | Bangka Belitung         | oh     | 410.000         | 120.000     |
| 11 | Banten                  | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 12 | Jawa Barat              | oh     | 430.000         | 130.000     |
| 13 | D.K.I Jakarta           | oh     | 530.000         | 160.000     |
| 14 | Jawa Tengah             | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 15 | D.I. Yogyakarta         | oh     | 170.000         | 130.000     |
| 16 | Jawa Timur              | oh     | 410.000         | 120.000     |
| 17 | Bali                    | oh     | 480.000         | 140.000     |
| 18 | Nusa Tenggara Barat     | oh     | 440.000         | 130.000     |
| 19 | Nusa Tenggara Timur     | oh     | 430.000         | 130.000     |
| 20 | Kalimantan Barat        | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 21 | Kalimantan Tengah       | oh     | 360.000         | 110.000     |
| 22 | Kalimantan Selatan      | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 23 | Kalimantan Timur        | oh     | 430.000         | 130.000     |



| No | Provinsi          | Satuan | Non Diklat (Rp) | Diklat (Rp) |
|----|-------------------|--------|-----------------|-------------|
| 24 | Kalimantan Utara  | oh     | 430.000         | 130.000     |
| 25 | Sulawesi Utara    | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 26 | Gorontalo         | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 27 | Sulawesi Barat    | oh     | 410.000         | 120.000     |
| 28 | Sulawesi Selatan  | oh     | 430.000         | 130.000     |
| 29 | Sulawesi Tengah   | oh     | 370.000         | 110.000     |
| 30 | Sulawesi Tenggara | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 31 | Maluku            | oh     | 380.000         | 110.000     |
| 32 | Maluku Utara      | oh     | 430.000         | 130.000     |
| 33 | Papua             | oh     | 580.000         | 170.000     |
| 34 | Papua Barat       | oh     | 480.000         | 140.000     |
| 35 | Papua Barat Daya  | oh     | 480.000         | 140.000     |
| 36 | Papua Tengah      | oh     | 580.000         | 170.000     |
| 37 | Papua Selatan     | oh     | 580.000         | 170.000     |
| 38 | Papua Pegunungan  | oh     | 580.000         | 170.000     |

Keterangan:

- Uang harian diberikan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Uang harian perjalanan dinas pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh selain SKPD pada Pemerintah Daerah.
- Satuan oh = orang/hari

**e. Uang Representasi**

Uang representasi diberikan secara harian dan secara *lumpsum* untuk setiap kali melakukan perjalanan dinas dalam negeri di luar Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.

**Satuan Uang Representasi**

| Uraian                             | Besaran (Rp) |
|------------------------------------|--------------|
| Wali Kota                          | 250.000      |
| Pimpinan/Anggota DPRD              | 250.000      |
| Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) | 150.000      |



#### f. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diberikan secara riil dan digunakan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.

#### Satuan Uang Penginapan

| No. | Provinsi                | Satuan | Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD | Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) | Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV | Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I |
|-----|-------------------------|--------|---|--|---|--|
| 1   | Nangroe Aceh Darussalam | oh     | 4.420.000                                 | 3.526.000  | 1.533.000                                       | 770.000  |
| 2   | Sumatera Utara          | oh     | 4.960.000                                 | 2.195.000  | 1.100.000                                       | 699.000  |
| 3   | Riau                    | oh     | 3.820.000                                 | 3.119.000  | 1.650.000                                       | 852.000  |
| 4   | Kepulauan Riau          | oh     | 5.344.000                                 | 2.318.000  | 1.297.000                                       | 792.000  |
| 5   | Jambi                   | oh     | 5.000.000                                 | 4.102.000  | 1.225.000                                       | 580.000  |
| 6   | Sumatera Barat          | oh     | 5.236.000                                 | 3.332.000  | 1.353.000                                       | 701.000  |
| 7   | Sumatera Selatan        | oh     | 5.850.000                                 | 3.083.000  | 1.955.000                                       | 861.000  |
| 8   | Lampung                 | oh     | 4.491.000                                 | 2.488.000  | 1.425.000                                       | 580.000  |
| 9   | Bengkulu                | oh     | 2.140.000                                 | 1.628.000  | 1.546.000                                       | 692.000  |
| 10  | Bangka Belitung         | oh     | 3.827.000                                 | 2.838.000  | 1.957.000                                       | 649.000  |
| 11  | Banten                  | oh     | 5.725.000                                 | 2.373.000  | 1.204.000                                       | 724.000  |
| 12  | Jawa Barat              | oh     | 5.381.000                                 | 2.755.000  | 1.201.000                                       | 686.000  |
| 13  | D.K.I Jakarta           | oh     | 8.720.000                                 | 2.063.000  | 992.000   | 730.000  |
| 14  | Jawa Tengah             | oh     | 5.303.000                                 | 1.850.000  | 1.201.000                                       | 750.000  |
| 15  | D.I. Yogyakarta         | oh     | 5.017.000                                 | 2.695.000  | 1.384.000                                       | 845.000  |
| 16  | Jawa Timur              | oh     | 4.449.000                                 | 2.007.000  | 1.153.000                                       | 814.000  |
| 17  | Bali                    | oh     | 6.848.000                                 | 2.433.000  | 1.685.000                                       | 1.138.000  |



| No. | Provinsi            | Satuan | Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD | Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) | Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV | Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I |
|-----|---------------------|--------|---|--|---|--|
| 18  | Nusa Tenggara Barat | oh     | 4.375.000                                 | 2.648.000  | 1.418.000                                       | 907.000  |
| 19  | Nusa Tenggara Timur | oh     | 3.750.000                                 | 2.133.000  | 1.355.000                                       | 688.000  |
| 20  | Kalimantan Barat    | oh     | 2.654.000                                 | 1.923.000  | 1.125.000                                       | 538.000  |
| 21  | Kalimantan Tengah   | oh     | 4.901.000                                 | 3.391.000  | 1.160.000                                       | 659.000  |
| 22  | Kalimantan Selatan  | oh     | 4.797.000                                 | 3.316.000  | 1.500.000                                       | 697.000  |
| 23  | Kalimantan Timur    | oh     | 4.000.000                                 | 2.188.000  | 1.507.000                                       | 804.000  |
| 24  | Kalimantan Utara    | oh     | 4.000.000                                 | 2.735.000  | 1.507.000                                       | 904.000  |
| 25  | Sulawesi Utara      | oh     | 4.919.000                                 | 2.290.000  | 1.207.000                                       | 978.000  |
| 26  | Gorontalo           | oh     | 4.168.000                                 | 3.107.000  | 1.606.000                                       | 955.000,   |
| 27  | Sulawesi Barat      | oh     | 4.076.000                                 | 3.098.000  | 1.344.000                                       | 704.000  |
| 28  | Sulawesi Selatan    | oh     | 4.820.000                                 | 1.938.000  | 1.423.000                                       | 745.000  |
| 29  | Sulawesi Tengah     | oh     | 2.309.000                                 | 2.027.000  | 1.679.000                                       | 951.000  |
| 30  | Sulawesi Tenggara   | oh     | 3.088.800                                 | 2.574.000  | 1.297.000                                       | 786.000  |
| 31  | Maluku              | oh     | 3.467.000                                 | 3.240.000  | 1.059.000                                       | 667.000  |
| 32  | Maluku Utara        | oh     | 4.611.600                                 | 3.843.000  | 1.160.000,                                      | 605.000  |
| 33  | Papua               | oh     | 3.859.000                                 | 3.318.000  | 2.521.000                                       | 1.038.000  |
| 34  | Papua Barat         | oh     | 3.872.000                                 | 3.341.000  | 2.056.000                                       | 967.000  |
| 35  | Papua Barat Daya    | oh     | 3.872.000                                 | 3.341.000  | 2.056.000                                       | 967.000  |
| 36  | Papua Tengah        | oh     | 3.859.000                                 | 3.318.000  | 2.521.000                                       | 1.038.000  |
| 37  | Papua Selatan       | oh     | 5.673.000                                 | 4.877.000  | 3.706.000                                       | 1.526.000  |



| No. | Provinsi         | Satuan | Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD | Anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) | Pejabat Administrator (Eselon III)/ Golongan IV | Pejabat Pengawas (Eselon IV)/ Golongan III, II dan I |
|-----|------------------|--------|---|--|---|--|
| 38  | Papua Pegunungan | oh     | 5.711.000                                 | 4.911.000  | 3.731.000                                       | 1.536.000  |

Keterangan:

1. Biaya hotel/penginapan diberikan secara *at cost* sesuai batas maksimal dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
2. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsom.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada standar biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 3 lebih tinggi dari standar biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Biaya hotel/penginapan diberikan sesuai dengan alokasi perjalanan dinas:
  - a. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di luar Jawa paling lama 4 (empat) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 3 (tiga) malam.
  - b. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa paling lama 3 (tiga) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 2 (dua) malam.
  - c. Alokasi waktu perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Jawa dengan rincian sebagai berikut:
    - Dalam DIY, Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 1 (satu) hari tidak dapat diberikan biaya hotel/penginapan.
    - Jateng kecuali Purworejo, Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang : 2 (dua) hari, dapat diberikan biaya hotel/penginapan paling banyak 1 (satu) malam.
6. Satuan oh = orang/hari



#### 15.4. Perjalanan Dinas Luar Negeri

- a. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas atau negara.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perjalanan ke luar negeri di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah.
- c. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

#### 15.5. Ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Khusus pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah bagi pimpinan dan anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- 2) Komponen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi:
  1. biaya transportasi;
  2. biaya taksi;
  3. uang harian;
  4. uang representasi; dan
  5. biaya penginapan.
- 3) Pertanggungjawaban secara *lumpsum* dibayarkan secara sekaligus sesuai dengan besaran yang tercantum di dalam tabel dan berlaku sebagai batas tertinggi dan tidak diberikan kompensasi penambahan biaya meskipun secara riil biaya yang dikeluarkan melebihi standar yang ditetapkan.
- 4) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD meliputi:
  - Surat tugas/surat perintah yang sah;
  - Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
  - Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - Pakta Integritas; dan
  - Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi berupa foto kegiatan.
- 5) Bukti pengeluaran hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.





- 6) Dalam rangka pengendalian pengeluaran belanja, pelaksana perjalanan dinas melaporkan tiket pesawat, *boardingpass*, dan/atau moda transportasi lainnya.
- 7) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam 1 (satu) hari, maka tidak diberikan uang taksi.

Contoh format kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum sebagai berikut:

|  |  |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: auto;">Logo daerah</div>     | <b>KOP NASKAH DINAS<br/>PERANGKAT DAERAH</b>   |
| Tahun Anggaran:  |  |
| No. Kuitansi:  |  |
| <b><u>KUITANSI</u></b>   |  |
| Sudah Terima dari :  |  |
| Sebesar :  |  |
| Terbilang :  |  |
| Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... dengan rincian : |  |
| 1. Uang harian : Rp.....   |  |
| 2. Biaya transportasi : Rp.....  |  |
| 3. Biaya penginapan : Rp.....  |  |
| 4. Uang representasi : Rp.....   |  |
| 5. Biaya Taksi : Rp.....   |  |
| Yogyakarta, .....20...   |  |
| Ttd  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 80px; margin: auto;">Materai<br/>Rp.10.000</div> |
| .....  |  |
| Menyetujui Pengguna Anggaran/<br>Kuasa Pengguna Anggaran*)   | Bendahara Pengeluaran/Bendahara<br>Pengeluaran Pembantu  |
| .....<br>NIP.  | .....<br>NIP.  |



Contoh format Pakta Integritas sebagai berikut:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Logo daerah   | KOP NASKAH DINAS<br>PERANGKAT DAERAH |
| <hr/> <b>PAKTA INTEGRITAS</b><br><b>PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN</b><br><b>RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA</b>  |                                      |
| <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama :<br/>Tempat, tanggal lahir :<br/>N I K :<br/>Jabatan :<br/>Alamat :</p> <p>Dengan ini menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas/Surat Perintah*) Nomor .... Tanggal ... dalam rangka melaksanakan kegiatan ... ke ... dari tanggal ... s.d. ...</li><li>2. Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.</li><li>3. Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li></ol> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, .....20...</p> <p style="text-align: right;">Pelaksana Perjalanan Dinas,</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 5px;"><p>Materai</p><p>Rp.10.000</p></div> <p style="text-align: right;">.....</p> |                                      |
| <p>*) Pilih satu</p>  |                                      |



### 15.6. Bantuan Akomodasi Tamu

Untuk tamu/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Yogyakarta dapat disediakan bantuan akomodasi dan transportasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan biaya tiket pulang pergi dengan pesawat terbang/kereta api/bus/kapal yang dibuktikan dengan tiket asli.
2. Bantuan biaya transport dari daerah lain di Pulau Jawa pulang pergi dengan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan bantuan biaya transport setinggi-tingginya sebesar Rp500.000,00 per kendaraan.
3. Bantuan biaya akomodasi untuk tamu/narasumber sebagai berikut:

| No. | Tingkatan Jabatan   | Biaya (OH) (Rp) |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Eselon I  | 1.500.000       |
| 2   | Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II)                                    | 1.200.000       |
| 3   | Pejabat Administrator (Eselon III)                                    | 1.000.000       |
| 4   | Pejabat Pengawas (Eselon IV)  | 800.000         |
| 5   | JFT Gol Iva ke atas setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III)  |                 |
| 6   | JFT Gol III d ke bawah/JFU setara dengan Pejabat Pengawas (Eselon IV) |                 |

4. Apabila biaya melebihi dari ketentuan, untuk Eselon I dan Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dapat dibayarkan sesuai dengan *bill*/kuitansi yang sah.
5. Penganggaran bantuan akomodasi tamu dijadikan satu dengan penganggaran paket meeting.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

